

**KERJA SAMA *CONSERVATION INTERNATIONAL* DENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
KONSERVASI HIU DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh:
UMMU AFIFA ULFAH
NPM 1746071009**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**KERJA SAMA *CONSERVATION INTERNATIONAL* DENGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
KONSERVASI HIU DI INDONESIA**

Oleh

UMMU AFIFA ULFAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KERJA SAMA *CONSERVATION INTERNATIONAL* (CI) DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) DALAM KONSERVASI HIU DI INDONESIA

Oleh

UMMU AFIFA ULFAH

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) bawah laut yang melimpah dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia menjadi sektor andal bagi Pemerintah Republik Indonesia. Namun, populasi ikan di Indonesia mengalami penurunan terutama ikan hiu yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan CI dalam konservasi hiu di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori kerja sama Internasional, *non-governmental organization* (NGO), dan kerja sama NGO dengan pemerintah nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis studi pustaka. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari buku terkait teori hubungan internasional dan data yang disajikan oleh CI dan KKP terkait kerja sama bidang kelautan dan perikanan.

Hasil penelitian ini adalah (1) *Center the voice of government* menghasilkan tanggung jawab pelaksanaan kerja sama yang diemban oleh lintas lembaga, yaitu CI dan KKP dan lintas sektor seperti tingkat nasional dan daerah. (2) *Implement within existing government delivery and data systems* menghasilkan bahwa CI mengintegrasikan data program ke dalam sistem pengumpulan data pemerintah melalui laporan kinerja tahunan KKP yang kemudian disediakan kepada sektor publik. (3) *Build relationships with government partners at all levels* menunjukkan CI bekerja dengan pemerintah daerah kabupaten dan provinsi dengan yuridiksi kelautan untuk menempatkan kerangka hukum yang relevan. (4) *Progressively transfer real ownership to government partners* menghasilkan program inisiasi strategis hiu dan pari yang dimiliki oleh CI, dikembangkan oleh KKP melalui prosiding simposium hiu dan pari di Indonesia.

Kata kunci: *non-governmental organization*, pemerintah, kerja sama, konservasi hiu.

ABSTRACT

THE COOPERATION OF MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA AND CONSERVATION INTERNATIONAL IN SHARK CONSERVATION IN INDONESIA

By

UMMU AFIFA ULFAH

As a maritime country, Indonesia has abundant natural resources that makes the Indonesian marine and fisheries sector become a reliable sector for the Government of the Republic of Indonesia. However, the fish population in Indonesia has decreased, especially sharks, which have an important role in the balance of the marine ecosystem. This study aims to determine the implementation of the cooperation carried out by KKP and CI in shark conservation in Indonesia. This study uses the theory of international cooperation, *non-governmental organization* (NGO), and the cooperation of NGO with the national government. This study uses a qualitative method and literature study analysis. The used of data sources is secondary data from books related to international relations theory and data presented by CI and KKP related to cooperation in the marine and fisheries sector. The results of this study are (1) Center the voice of government shows that responsibility for the implementation of cooperation carried out by cross-institutions, namely CI and KKP and across sectors such as national and regional levels. (2) Implement within existing government delivery and data systems shows that CI integrates their program data into the government data collection system through KKP's annual performance report which provided to the public sector. (3) Build relationships with government partners at all levels shows that CI works with district and provincial governments with maritime jurisdictions to put in place the relevant legal framework. (4) Progressively transfer real ownership to government partners shows that in a strategic shark and ray initiation program owned by CI, developed by KKP through the proceedings of shark and ray symposium in Indonesia.

Keywords: KKP and CI, international cooperation, shark conservation.

Judul Skripsi : **KERJA SAMA CONSERVATION INTERNATIONAL
DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN DALAM KONSERVASI HIU DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Ummu Afifa Ulfah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1746071009**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Gita Karisma, S.IP., M.Si
NIP. 19870128 201404 2 001


Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., MA
NIK 231602 880717 201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

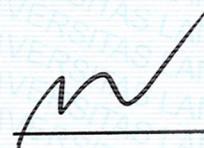
Ketua : **Gita Karisma S.IP., M.Si.**



Sekretaris : **Fitri Juliana Sanjaya S.IP., M.A.**



Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **3 Februari 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 03 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Ummu Afifa Ulfah

1746071009

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Jakarta, 6 Juli 1999, sebagai anak ketiga dari Bapak Suprastiyo dan Ibu Endah Ayu Retno Wulan. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, yaitu Oka Prasmadhitama, Humam Kurniadhitama, dan Aurolla Saptarini. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN Sudimara 7 Ciledug Tangerang tahun 2005-2008, kemudian penulis pindah ke SDN 1 Rawa Laut Bandar Lampung tahun 2008-2011, lalu dilanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Bandar Lampung tahun 2011-2014. Lalu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung tahun 2015-2017. Setelah menempuh bangku sekolah, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Lampung dengan program studi Hubungan Internasional. Selama masa perkuliahan penulis turut mengikuti berbagai kegiatan kepanitiaan dan organisasi seperti menjadi panitia pada Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) ke-30 Universitas Lampung tahun 2018 divisi *Liaison Officer* (LO), dan beberapa kegiatan internal jurusan lainnya, serta menjadi bagian dari Pengurus Himpunan Jurusan Hubungan Internasional (PHMJHI) Universitas Lampung periode 2019-2020 dan kegiatan magang di Dinas Pariwisata Provinsi Bali tahun 2019 serta Sekretariat NCB-Interpol Indonesia tahun 2021.

MOTTO

“Better an oops than a what if”

- Beau Taplin

PERSEMBAHAN

**Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kupersembahkan Skripsi ini untuk:**

“Keluargaku”

Ayah dan Ibu

Paman dan Bibi, serta keluarga besarku.

Sebagai wujud rasa terima kasihku yang telah memberi motivasi serta semangat untuk terus pantang menyerah dalam melakukan sesuatu dan bangkit dari kesalahan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *Conservation International* (CI) dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia” . Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan sebagai dosen pembahas penulis sudah membantu penulis untuk membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Mbak Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan ilmu, waktu, masukan, bimbingan, nasihat, serta motivasi dan pengalaman kepada penulis selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional.
4. Mbak Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan nasihat dan masukan kepada penulis.
5. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional serta staf jurusan atas ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang diberikan pada penulis.

6. Terima kasih kepada Ayah dan Ibu, yang terus memberikan doa dan dukungan kepada penulis dan nasihat ketika penulis lelah dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada sahabat saya Noprita Ulfah Harahap yang telah menemani sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terima kasih telah mendengarkan seluruh keluh kesah penulis selama perjalanan perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis akan terus melanjutkan perjalanan persahabatan ini hingga tua nanti.
8. Terima kasih kepada Aldo Prima Arya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Terima kasih untuk ketulusannya yang tidak pernah lelah selama menemani penulis menyelesaikan semua persoalan perkuliahan ini. Semoga kita berdua bisa melanjutkan hubungan ini ke tahap selanjutnya.
9. Terima kasih kepada Opang, Adil, Ave, Kendi, Lika, dan Wildan yang juga hadir dalam hari-hari penulis untuk memberikan warna di setiap langkah penulis menjalani hidup ini.
10. Terima kasih kepada Aurolla Saptarini yang menjadi seorang adik, terima kasih karena telah menemani malam-malam penulis dan mendengarkan keluh kesah penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini, walaupun aurolla tidak melakukan apapun dalam hal membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama perjalanan kuliah, penulis bangga terhadap diri sendiri yang selalu merasa lelah namun sadar akan kekurangan dan keterbatasan diri sendiri sehingga penulis merasa memiliki kewajiban yang harus diselesaikan demi diri sendiri dan juga orang tua.

Bandar Lampung, 03 Februari 2022

Ummu Afifa Ulfah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Penelitian Terdahulu	5
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Landasan Konseptual	20
2.1.1. Konsep Kerja sama Internasional.....	20
2.1.2. Konsep Non-Governmental Organization.....	22
2.1.2. Kerja Sama NGO dengan Pemerintah Nasional	23
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Fokus Penelitian.....	30
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5. Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	35
4.1.1. <i>Conservation International</i>	40
4.2. Kerja Sama KKP dan CI dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia	48
4.2.1 <i>Center the Voice of Government</i> (Pusatkan Suara pada Pemerintah)	49
4.2.2 <i>Implement within existing government delivery and data systems</i> (Penerapan pengiriman dan data sistem pemerintah yang ada)	59
4.2.3 <i>Build Relationships with government partners at all levels</i> (Membangun Hubungan dengan mitra Pemerintah di semua tingkatan)	65
4.2.4 <i>Progressively transfer real ownership to government partners</i> (transfer kepemilikan nyata kepada pemerintah secara progresif)	71
4.3 Analisis Implementasi Kerja Sama KKP dan CI dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia	72
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Hasil Tangkapan Hiu Tahun 2015-2017	4
Gambar 2. Grafik Hasil Tangkapan Hiu Tahun 2015-2017	4
Gambar 3. Biro Kerja Sama dan Humas KKP	36
Gambar 4. Kerja Sama Bilateral Aktif	37
Gambar 5. Kerja Sama Multilateral Aktif	38
Gambar 6. Kerja Sama Antarlembaga Aktif	39
Gambar 7. Kerja Sama Antarlembaga Non-pemerintah Aktif.....	39
Gambar 8. Pengukuran Dampak Manusia terhadap Alam.....	45
Gambar 9. Skema Hasil Konservasi Jenis Ikan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10. Skema kerja dari Shark Tagging Technology	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11. Diagram Pie Pendapatan CI	76
Gambar 12. Diagram Pie Pengeluaran CI.....	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Populasi Red List Hiu Di Indonesia.....	2
Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. Kerangka Pemikiran.....	26

DAFTAR SINGKATAN

SDA	: Sumber Daya Alam
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
WCS	: <i>Wildlife Conservation Society</i>
WWF	: <i>World Wildlife Fund</i>
TNC	: <i>The Nature Conservancy</i>
CTC	: <i>Coral Triangle Center</i>
CI	: <i>Conservation International</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
BLKB	: Bentang Laut Kepala Burung Papua Barat
SAP	: Suaka Alam Perairan
E-KKP3K	: Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
PSPL	: Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut
DITJEN	: Direktorat Jenderal
MPA	: <i>Marine Protected Area</i>
HI	: Hubungan International
IGOs	: <i>Intergovernmental Organizations</i>
MNC	: <i>Multinational Corporation</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan 17.504 pulau yang dikelilingi perairan dan dikenal sebagai kawasan keanekaragaman hayati laut di dunia dan dianggap sebagai negara maritim. (Putri, Dwi, & Widiastuti, 2017). Indonesia dengan keragaman Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang penting bagi kehidupan manusia. Kekayaan alam tersebut terdiri dari SDA hayati yang berupa makhluk hidup seperti tumbuhan maupun hewan dan non hayati yang berupa air, udara, tanah, matahari, tambang, dan minyak bumi. (Hidayat, 2011) Dengan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, menjadikan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut, antara lain 8.500 jenis ikan, 555 jenis rumput laut, dan 950 jenis biota terumbu karang. (Dermawan, 2017)

Untuk itu, Indonesia memiliki sebuah kabinet kerja dengan KKP untuk dapat bertanggung jawab dalam berbagai urusan di bidang kelautan dan perikanan maupun terkait kelestariannya. Permasalahan yang ditangani oleh KKP pun beragam, mulai dari penentuan tempat konservasi, pengelolaan ruang dan laut, pemberdayaan manusia dan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, serta berbagai permasalahan terkait yang disebabkan oleh manusia. (KKP, 2021) Dengan demikian, untuk menangani hal tersebut, tentunya KKP membutuhkan mitra kerja sama dari berbagai pihak untuk terlibat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan baik dari aktor pemerintah, maupun dari *Non-Governmental Organization* (NGO).

KKP bermitra dengan beberapa negara, seperti Maroko dan Malaysia dalam bidang penelitian perikanan dan kesepakatan pengelolaan wilayah tangkapan ikan. (KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Lalu, KKP juga bekerjasama dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS), *The Nature Conservancy* (TNC), *World Wildlife Fund* (WWF), *Coral Triangle Center* (CTC), dan *Conservation International* (CI). Kelima NGO tersebut turut aktif bekerja sama dengan KKP dalam berbagai bidang yang berbeda. TNC, WCS dan WWF berfokus pada konservasi hewan dan tumbuhan darat. CTC dan CI lebih berfokus pada konservasi bidang kelautan yang dimana CTC berfokus dalam menjaga dan melestarikan keindahan koral dan CI berfokus dalam konservasi hewan dan tumbuhan laut.

Keputusan kerja sama tersebut didasari pada kondisi kelestarian hewan laut yang mengalami penurunan populasi signifikan pada 50 tahun terakhir, terutama pada ikan hiu. Populasi hiu telah menurun sebanyak 70% dari populasi dunia, (CNN, 2021) Oleh karena itu, Indonesia menempati posisi pertama dalam 5 besar negara dengan tangkapan sirip hiu terbesar di dunia, setelah India, Spanyol, Taiwan dan Meksiko. Tingginya produksi ini disebabkan Indonesia memiliki wilayah penangkapan ikan yang besar dibandingkan dengan negara penghasil hiu lainnya. (RAN, 2020)

Maka dari itu, situasi ini dijadikan fokus dalam isu internasional khususnya di kalangan penggiat konservasi karena hiu dibutuhkan dalam menjaga dan mengatur keseimbangan ekosistem laut. Untuk itu, KKP dan CI bekerja sama dalam menangani konservasi Hiu di Indonesia. Berikut adalah data ancaman kepunahan hiu di Indonesia.

Tabel 1. Populasi Red List Hiu Di Indonesia Berdasarkan International Union for Conservation (IUCN)

No	Jenis Ikan	Spesies	Status
1	Hiu Paus	<i>Rhincodon typus</i>	terancam punah (endangered/EN)
2	Hiu Martil	<i>Sphyrna lewini</i> , <i>S. mokarran</i> , <i>S.</i>	Sangat terancam punah (Critically endangered/CR)
		<i>Zygaena</i>	Rawan punah (Vulnerable/VU)
3	Hiu Lanyam	<i>Carcharhinus plumbeus</i> , <i>C. obscurus</i> ,	Rawan punah (Vulnerable/VU)

		<i>Carcharhinus Longimanus</i>	terancam punah (endangered/EN)
--	--	--------------------------------	--------------------------------

Sumber : Penguatan Pengelolaan KKP Ditjen Kp3K (Kp3K, 2011)

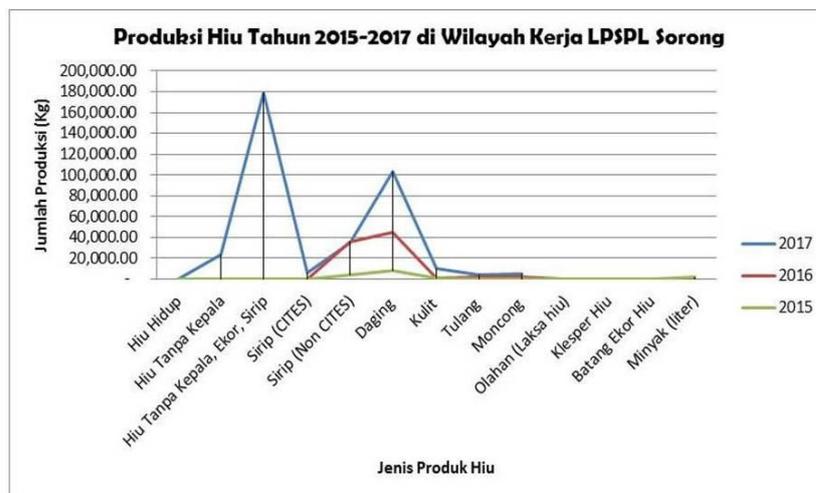
CI menyatakan bahwa ancaman kepunahan hiu ini disebabkan oleh adanya interaksi dengan manusia. (International, 2021). Hal ini menyebabkan banyak hiu yang terluka akibat tidak adanya pemantauan interaksi tersebut serta perburuan terhadap sirip hiu yang dijadikan keuntungan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bahan jual beli dan bahan konsumsi pangan. Kurangnya pengelolaan reproduksi hiu juga menyebabkan kepunahan bagi jenis-jenis hiu yang ada di Indonesia. (International, 2021) Perburuan hiu yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun lokal yang tidak bertanggung jawab tersebut menggunakan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau bahkan cenderung merusak alam dan menimbulkan kondisi kelautan dan perikanan Indonesia menjadi kritis hingga mengakibatkan adanya penangkapan berlebih (*overfishing*). Karena itu sebagian wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia masuk pada daftar merah pada IUCN untuk beberapa jenis ikan dan makhluk laut lainnya yang menjadi prioritas utama dalam penanganan konservasi.

Pada tahun 2015-2017, data menunjukkan hasil tangkapan hiu yang terus meningkat pada wilayah Sorong Papua dengan menjadikan hiu sebagai penghasil utama dalam jumlah dan jenis produk yang diperdagangkan. KKP melalui Unit Pelaksana Teknis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (PSPL) Sorong di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut (Ditjen PRL) melakukan pemantauan perdagangan pada hiu dengan data sebagai berikut. (Ditjen PRL, 2019)

Tabel 2. Hasil Tangkapan Hiu Tahun 2015-2017 Wilayah Kerja Loka PSPL Sorong

No	Jenis Produk	Jumlah Produk (Kg)		
		2015	2016	2017
1	Hiu Hidup	-	-	4.30
2	Hiu Headless	-	-	23,000.00
3	Hiu Tanpa Kepala, Ekor, Sirip	-	-	178,888.00
4	Sirip (CITES)	4.67	183.25	5,636.21
5	Sirip (Non CITES)	3,518.82	35,122.94	34,051.38
6	Daging	7,579.00	45,054.00	103,638.10
7	Kulit	1,000.00	570.00	10,160.00
8	Tulang	-	1,390.00	4,277.00
9	Moncong	-	1,300.00	5,113.00
10	Olahan Laksa Hiu	-	-	-
11	Klesper Hiu	-	-	10.10
12	Batang Ekor	-	-	62.21
13	Minyak (liter)	1,510.00	-	-
	Total	13,612.49	83,620.19	364,840.30

Sumber : Ditjen Pengelolaan Ruang dan Laut



Gambar 1. Grafik Hasil Tangkapan Hiu Tahun 2015-2017 Wilayah Kerja Loka PSPL Sorong

Sumber : Ditjen Pengelolaan Ruang dan Laut

Data tersebut menunjukkan hasil tangkapan yang kian meningkat selama tiga tahun berturut-turut atau *over-fishing* yang menjadikan populasi hiu semakin menurun. Sehingga permasalahan ini menjadi isu penting dalam politik lingkungan global. Melihat kondisi ini, KKP menetapkan perlindungan hiu sebagai upaya mendasar dalam perlindungannya di Indonesia pada tahun 2016-

2020. (KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2018). Peraturan ini bertujuan untuk melarang penangkapan hiu hamil, hiu anakan, dan hiu di kawasan lindung. Identifikasi status hiu dilakukan secara bijaksana dan memasukkan prinsip pencegahan ke dalam prosesnya.

1.2. Penelitian Terdahulu

Pada sub-bab ini akan menjelaskan literatur review yang berhubungan dengan topik penelitian penulis yang sudah dijelaskan sedikit di latar belakang dan sebagai acuan serta bahan referensi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan 6 penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis yang berjudul Implementasi Kerja Sama *Conservation International* (CI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia.

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Novita Kusumadewi, (Kusumadewi, 2017) seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, terkait dengan peranan NGO dalam isu lingkungan. Penelitian ini menggambarkan kepunahan ikan pari manta melalui perdagangan internasionalnya. Penelitian ini berfokus pada peranan CI dalam upaya konservasi ikan pari manta di Indonesia yaitu peran advokasi dan monitoring CI di Indonesia dan peran fasilitasi dan konsultasi CI di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif atau deskriptif dengan konsep dalam penelitian ini menggunakan *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk melihat bagaimana peranan CI dalam menangani permasalahan kepunahan ikan pari manta di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa dengan menangani permasalahan kepunahan pari manta di Indonesia membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan CI untuk menangani upaya kelestariannya. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kerja sama pemerintah dan CI dibandingkan upaya CI dalam konservasi ikan pari manta di Indonesia.

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Fhika Rizky Meisandy (Meisandy, 2018), seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas

Muhammadiyah Malang, terkait dengan kepentingan kerja sama negara dengan NGO. Penelitian ini menggambarkan secara terurai mengenai kerjasama Indonesia dan FAO dan berfokus dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Dalam penelitian ini penulis merujuk konsep kepentingan nasional dan kerjasama internasional. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya. Berdasarkan kajian ini, ditemukan bahwa ada dua kepentingan dasar bagi Indonesia dalam kerjasama dengan FAO, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dan keamanan. Dari sisi ekonomi, diketahui bahwa Indonesia berkepentingan untuk meminimalisir kerusakan akibat IUU fishing. Sementara dari sisi keamanan politik, Indonesia tertarik untuk mengurangi kasus IUU fishing dan berbagai kejahatan lintas negara. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan kepentingan yang melandasi FAO sebagai organisasi pangan dan pertanian dalam bekerjasama dengan Indonesia dalam menangani permasalahan *Illegal Fishing*.

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh M. Ismail, seorang mahasiswa dari Program Studi Politik Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, terkait dengan penerapan program konservasi di salah satu kabupaten Indonesia dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Penelitian ini berfokus dalam peran pemerintah dalam mengimplementasikan program tersebut. Konsep yang digunakan di penelitian ini adalah konsep Peran Pemerintah untuk mengetahui bagaimana pemerintah berperan dalam menerapkan program konservasinya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa departemen kelautan dan perikanan pemerintah daerah memiliki peran dalam melestarikan makanan laut dan sumber daya perikanan, terutama dengan pemasok utama produk perikanan laut di daerah tersebut. Namun, pada penelitian ini, lebih menekankan dalam menjelaskan berbagai program konservasi secara keseluruhan dan tidak menjelaskan mengenai implementasi tiap masing-masing programnya.

Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Endah Wagiyanti, seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, terkait kerja sama negara dan NGO dalam penanganan konservasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama

pemerintah dengan WWF Indonesia dalam penanganan kasus kepunahan gajah di Sumatera tahun 2009-2015. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan landasana analitis Kerjasama Internasional dan NGO untuk mengetahui bagaimana peranan masing-masing aktor dalam menjalin kerjasama untuk permasalahan konservasi gajah di Indonesia tahun 2009-2015. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kerjasama antara kedua aktor tersebut belum berhasil karena adanya berbagai hambatan. Hambatan dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Namun, pada penelitian tersebut lebih menekankan kepada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kepunahan gajah, tetapi tidak membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dan WWF dalam penanganan kasus kepunahannya.

Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Suciyanti Tri Regina, mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, terkait implementasi program kerjasama Indonesia dan NGO. Penelitian ini berfokus dalam implementasi program kerjasama Indonesia dan JICA pada penanganan proyek mangrove di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membantu dalam merumuskan masalah. Konsep dalam penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional dan organisasi internasional untuk mengetahui bagaimana peran masing-masing aktor dalam menjalankan program kerjasamanya. Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil bahwa konsep *Shared-Learning* digunakan diberbagai sektor dalam implementasi programnya. Konsep *Shared-Learning* ini digunakan sebagai pembelajaran tentang suatu keberhasilan dalam kegiatan konservasi mangrove dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Hasil dari kerja sama antara Indonesia dan JICA melalui program MECS ini terbentuknya pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai tempat dan menyebabkan adanya pemanfaatan sumber daya dan adanya mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN.

Keenam, penelitian ini merupakan penelitian internasional yang telah dilakukan oleh Rachel Cadman, Bertrum H. MacDonald dan Suzuette S. Soomai pada Dalhousie University Canada, terkait hubungan kerjasama negara dan NGO

lingkungan Kanada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran NGO lingkungan dalam pengambilan keputusan tentang *Marine Protected Areas* (MPA), terutama berfokus dalam bagaimana NGO lingkungan menggunakan pengetahuannya dalam proses pelaksanaan konservasi laut Kanada. Penulis merujuk pada landasan analitis *Grounded Theory* yang digunakan dalam mendapatkan pemahaman mengenai sistem keputusan melalui wawasan yang diperoleh dari orang-orang dengan pengalaman langsung oleh tangan pertama yang mencerminkan pengamatan paling dasar dan signifikan berdasarkan pada metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan lapangan. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan hasil peranan penting yang dilakukan oleh NGO dalam tata kelola konservasi ialah berperan dalam empat tindakan yaitu berperan dalam advokasi, pengumpulan informasi dan pengetahuan, dan administratif.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu	Judul penelitian	Pendekatan penelitian	Konsep dan teori	Fokus dan tujuan penelitian
Novita Kusumadewi, Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Penelitian tahun 2017)	Peran <i>Conservation International</i> (CI) dalam Upaya Melestarikan Ikan Pari Manta di Indonesia	Kualitatif	<i>Non-Governmental Organization</i> (NGO)	Penelitian ini berfokus dalam bagaimana upaya CI sebagai NGO dalam melestarikan ikan pari manta sebagai salah satu hewan yang terancam kepunahannya di Indonesia
Fhika Rizky Meisandy, Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (Penelitian tahun 2018)	Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Bidang Kelautan dan Perikanan dengan FAO dalam Kerjasama Menanggulangi <i>Illegal Fishing</i>	Kualitatif	<i>National Interest</i> dan Kerjasama Internasional	Penelitian ini memfokuskan pada kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam kerjasama Indonesia dan FAO dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya <i>illegal fishing</i> .
M. Ismail, Program Studi Politik Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya	Implementasi Program Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten	Kualitatif	Peran Pemerintah	Penelitian ini berfokus dalam peran pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan program pelestarian bidang kelautan dan

	Situbondo			perikanan.
Endah Wagiyanti, Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Penelitian pada tahun 2017)	Kerjasama WWF (<i>World Wide Fund</i>) dengan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Kepunahan Gajah di Sumatera Periode 2009-2015	Kualitatif	Kerjasama Internasional dan NGO	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama pemerintah Indonesia dengan WWF Indonesia dalam menangani kasus kepunahan gajah di Sumatera tahun 2009-2015 khususnya pada pengelolaan kawasan konservasi dan kendala-kendalanya.
Tri Regina, Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Penelitian pada tahun 2014)	Implementasi Program Kerjasama Indonesia dan JICA (<i>Japan International Cooperation Agency</i>) dalam Proyek MECS (<i>Mangrove Ecosystem Conservation and Sustainable Use</i>) di Surabaya dan Balikpapan Periode 2011-2013	Kualitatif	kerjasama internasional dan organisasi internasional	Penelitian ini berfokus dalam implementasi program kerjasama Indonesia dan JICA pada penanganan proyek mangrove di Indonesia.
Rachel Cadman, Bertrum H. MacDonald dan Suzuette S. Soomai pada Dalhousie University Canada (Penelitian pada tahun 2020)	<i>Sharing victories: Characteristics of Collaborative Strategies of Environmental Non-governmental Organizations in Canadian Marine Conservation</i>	Kualitatif	<i>Grounded Theory</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran NGO lingkungan dalam pengambilan keputusan tentang <i>Marine Protected Areas</i> (MPA) dan berfokus dalam bagaimana NGO lingkungan menggunakan pengetahuannya dalam proses pelaksanaan konservasi laut Kanada.

Sumber : diolah oleh penulis

Pada keenam penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki persamaan pada teori dan konsep dengan apa yang penulis gunakan. Selain itu, penelitian tersebut juga memiliki persamaan dari segi aktor NGOs berperan dan bekerja sama dengan aktor lain untuk menangani suatu permasalahan. Namun, dalam penelitian di atas belum ada yang meneliti bagaimana kerja sama dari aktor

NGOs dan *National Government* seperti yang penulis gunakan. Dan juga, penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti terkait permasalahan konservasi hiu di Indonesia.

Oleh karena itu, kedua belah pihak bekerjasama karena memiliki kepentingan atau tujuan yang sama yaitu untuk menyikapi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia, dalam penelitian ini secara khusus terkait dengan konservasi hiu di Indonesia. Aspek kerjasama telah tercermin dalam kerjasama kedua belah pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2017 tentang pengelolaan Cagar Alam Perairan Nasional di bawah Cagar Alam Kepulauan Raja Ampat dan Cagar Alam Perairan Kepulauan Waigeo Barat.

1.3. Rumusan Masalah

Hiu di Indonesia diklasifikasikan sebagai hewan yang terancam punah. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pelestarian KKP bersama CI. Namun, populasi hiu di Indonesia terus menurun dengan hasil tangkapan yang terus meningkat. Dengan demikian, peneliti akan membahas mengenai bagaimana implementasi kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia berdasarkan perjanjian kemitraan antara KKP dan CI melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan sebuah rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Implementasi Kerja Sama antara KKP dan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia?”

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan CI dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia
2. Menganalisis implementasi kerja sama KKP dan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini digunakan sebagai hal teoritis dan praktis, yaitu:

Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi dari kerja sama KKP dan CI dalam konservasi hiu di Indonesia, dan menambah pengetahuan terkait keterlibatan suatu NGO dalam melindungi hiu di Indonesia.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai ilmu baru dan pengetahuan baru dalam masalah keamanan lingkungan yaitu Konservasi Hiu di Indonesia dan menambah pengetahuan mahasiswa atau masyarakat umum dan bisa berguna sebagai referensi penelitian berikutnya.

Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian saya diharapkan bisa bermanfaat untuk pembaca dan memberikan informasi tentang upaya dari CI dan KKP dalam menyelesaikan isu lingkungan konservasi hiu di Indonesia yang sudah merusak ekosistem laut Indonesia.
2. Penelitian ini harus digunakan untuk meningkatkan wawasan penelitian, pengetahuan, pemahaman dan kapasitas di bidang hubungan internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Konseptual

Pada penelitian ini menggunakan dua landasan konseptual yaitu konsep kerja sama internasional, *Non-Governmental Organization* (NGO) dan konsep Kerja sama NGO dengan Pemerintah Nasional. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan kerja sama KKP dan CI dalam konservasi hiu di Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan konsep yang penulis gunakan, seperti berikut:

2.1.1. Konsep Kerja sama Internasional

Kerja sama internasional sudah menjadi perhatian utama sejak lahirnya studi HI sebagai suatu kajian ilmu. Kerja sama ini dijalin untuk mencegah terjadinya perang (*to prevent war*) dan mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*). Saat ini, tujuan dari adanya kerja sama internasional ini semakin menyebar ke berbagai bidang dan menjadi hal yang dibutuhkan oleh hampir semua negara. Semakin banyaknya jalinan kerja sama, membuat studi HI menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar yang melekat bersamaan dengan konsep-konsep lainnya. Menurut Robert Keohane, kerja sama terjadi ketika para aktor (*states* maupun *non-state*) menyesuaikan sikap perilaku mereka dengan aktor lainnya dan dilandasi melalui proses pengaturan kebijakan. (Bakry, 2017). Pada kerja sama terdapat dua hal penting, yaitu: (1) perilaku dari setiap aktor diperuntukkan pada tujuan bersama. (2) kerja sama menghasilkan keuntungan pada para pihak yang terlibat. Keohane memisahkan istilah kerja

sama dengan harmoni. Menurutnya, harmoni merupakan situasi di mana tidak ada tindakan dari para aktor yang menimbulkan kerugian atau saling merugikan. Untuk itu, apabila sudah tercipta suatu harmoni, maka kerja sama menjadi tidak perlu. (Bakry, 2017)

Kerja sama internasional selalu bertemu dengan adanya kepentingan nasional. Melalui kepentingan nasional, negara dapat bergerak dan saling membutuhkan untuk memenuhi tujuan nasionalnya. Masalah utama dari kerjasama internasional ini tergantung pada bagaimana keuntungan diperoleh dan mengarah pada perilaku kompetitif. (Perwita & Yadi, 2005). Hal ini selaras dengan pendapat Joseph Frankel yang mengatakan bahwa para aktor akan melakukan berbagai kerja sama apabila besar manfaat yang dihasilkan daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterimanya. (Bakry, 2017) Selain itu, keberhasilan kerja sama juga tergantung dari sifat kerja sama yang terjalin dan tujuan-tujuannya. Tujuan yang dicapai oleh pihak-pihak tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tujuan kerjasama yang ditentukan oleh persamaan yang mendasari masing-masing pihak yang bermitra. Maka, hal inilah yang dikatakan dengan kerja sama fungsional. (Bakry, 2017)

Terbentuknya kerja sama didasari dengan adanya rasa kepercayaan dari masing-masing aktor yang terlibat untuk melakukan kerja sama, manfaat yang diterima akan lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi yang harus ditanggung. Kerja sama internasional dari perspektif pluralisme memiliki empat asumsi dasar, yaitu: (Saeri, 2012)

1. Aktor non-negara memainkan peran dalam politik internasional, baik itu organisasi, kelompok, atau individu internasional maupun non-negara.
2. Negara bukanlah suatu kesatuan atau satu kesatuan, karena aktor-aktor lain selain Negara sama pentingnya dengan Negara dan menjadikan Negara bukan agen tunggal
3. Negara bukanlah aktor tunggal padahal sebenarnya membentuk kebijakan luar negeri negara adalah suatu proses termasuk konflik, persaingan dan kompromi yang terjadi di antara aktor-aktor dalam negara.
4. Isu-isu terkini tidak lagi terkait dengan kekuasaan atau keamanan nasional, tetapi dengan isu-isu sosial, ekonomi dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan Kalevi Holsti, kerja sama internasional dapat terjadi karena berbagai hal berikut:

1. Refleksi atas dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bersinggungan dapat menciptakan sesuatu yang dibutuhkan pemangku kepentingan;
2. Pemikiran atau tujuan aktor bahwa kebijakan yang diperkenalkan oleh aktor lain akan memudahkan aktor untuk mencapai kepentingannya;
3. Kesepakatan tentang beberapa masalah antara dua atau lebih entitas untuk mengambil keuntungan dari kepentingan mereka;
4. Ketentuan yang sah atau batal dalam pelaksanaan berbagai perjanjian di masa depan dibuat dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama;
5. Kesepakatan antar negara atau antar pihak yang dibuat untuk mencapai tujuan mereka. (Saeri, 2012)

2.1.2. Konsep Non-Governmental Organization

Pada perkembangannya, aktor-aktor dalam sistem hubungan internasional bukan hanya meliputi aktor negara saja, melainkan peranan *Inter-Governmental Organization* (IGOs), *Multi-National Corporations* (MNCs), *Non-Governmental Organization* (NGO), dan berbagai peranan individu yang mengambil bagian penting dalam sistem internasional. (Sitepu, 2011). Menurut University of London, organisasi internasional telah beroperasi hampir di seluruh dunia pada tahun 1839 dan 1914. LSM internasional telah mendefinisikan yang mana setiap organisasi internasional tidak lahir dari kesepakatan internasional. NGO merupakan suatu kelompok yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara regional, nasional, maupun internasional. Saat ini, NGO menjalankan peran sebagai aktor utama pada sektor ketiga dalam konsep pembangunan, aksi kemanusiaan, lingkungan dan hak asasi manusia” (Lewis, K, & S, 2020) NGO bekerja dengan menerima bantuan dana dari pemerintah, namun NGO tetap bekerja secara independen di luar dari pemerintah mana pun dan bekerja tanpa pengawasan dan perwakilan dari pemerintah. (Lewis, K, & S, 2020). NGO memiliki tujuan yang berlandaskan kepentingan bersama pada permasalahan-

permasalahan tertentu, dalam berbagai jenis dan fungsi sebagai penyedia jasa dan kemanusiaan.

Menurut Craig Warkentin, NGO merupakan sebuah perkumpulan nirlaba, swasta, maupun sukarela. Pada hubungan internasional, NGO mengarah pada suatu kelompok atau organisasi yang memiliki anggota dan kegiatannya melintasi batas nasional. (Bakry, 2017). Sedangkan menurut David Lewis menjelaskan NGO ke dalam lima karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, NGO merupakan organisasi yang dibuat dalam bentuk pertemuan-pertemuan secara terus-menerus, memiliki kantor pendukung, dan kelengkapan lainnya, sehingga NGO bersifat formal. *Kedua*, bersifat privat, yang di mana secara institusi, NGO terpisah dari pemerintah, namun tetap menjalankan kegiatannya melalui dukungan pemerintah. *Ketiga*, berorientasi nirlaba, apabila kegiatan yang dijalankan oleh NGO ini menghasilkan keuntungan dana, maka dana tersebut tidak ditunjukkan bagi pemilik atau direksi. *Keempat*, mengelola sendiri yang mana dapat mengendalikan dan mengatur urusan-urusannya sendiri. *Kelima*, bersifat sukarela (*voluntary*), walaupun tidak menyediakan staff yang sukarela, setidaknya terdapat adanya beberapa partisipan sukarela yang digunakan untuk menjalankan manajemen organisasi. (Bakry, 2017)

Pada penjelasan di atas, CI termasuk ke dalam kategori NGO yang mana merupakan organisasi internasional dan bergerak pada bidang lingkungan hidup. Berbagai kegiatan yang dijalankan oleh organisasi ini bersifat fungsional yang berjalan berdasarkan pada sifat dan berbagai fungsinya. Penelitian ini menggunakan CI sebagai anggota organisasi internasional yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui KKP pada permasalahan lingkungan hidup khususnya pada kepunahan hiu di Indonesia.

2.1.2. Kerja Sama NGO dengan Pemerintah Nasional

Kerja sama yang terjalin antara NGO dan juga pemerintah menurut Sesso Gbleou dan Jennifer Schechter yang merupakan seorang direktur dari *Integrate Health* di Togo dan salah satu pendiri dan CEO dari *Integrate Health* ini mengemukakan tentang “*How NGOs Can Work With Governments to Build Partnerships That Will Scale*” yang didalamnya juga mencakup pentingnya

kemitraan untuk berskala yang mana menjelaskan bahwa NGOs bisa cekatan dan fleksibel dan dapat mencoba hal-hal yang pemerintah tidak mampu melakukannya, baik secara finansial maupun politik. NGOs juga dapat mengambil resiko dan gagal, NGOs juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sedangkan pemerintah menetapkan kebijakan dan pendanaan nasional, yang memberikan skala dan keberlanjutan. Pemerintah dapat memanfaatkan dukungan NGOs untuk berinovasi dan meningkatkan akuntabilitas. (Gbleou & Schechter, 2020)

Menurut Sesso dan Jennifer, NGOs dapat bekerja secara efektif dengan pemerintah dan telah mempelajarinya selama lima tahun terakhir bekerja untuk membangun “*real partnership*” dengan pemerintah adalah sebagai berikut: (Gbleou & Schechter, 2020)

1. *Center the voice of Government*

Literatur mengenai skala melalui sektor “adopsi” publik cenderung tidak proporsional dan berfokus pada NGOs, sedangkan pemerintah berada dalam posisi sebagai penerima pasif inovasi. Namun, keberhasilan lainnya menggambarkan bahwa untuk mencapai hasilnya membutuhkan kerja sama dua arah yang tulus. Membangun kerja sama yang tulus perlu untuk “*putting government at the center*” sejak tahap awal merancang program atau prosesnya.

2. *Implement within existing government delivery and data systems*

Jika dengan melihat dapat mempercayai, maka dengan melihat program bekerja dalam sistem yang ada merupakan suatu prasyarat untuk berprogres dengan pemerintah. NGO bekerja dengan pemerintah nasional dengan menintegrasikan data dampak program ke dalam sistem pengumpulan data pemerintah. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dan dikumpulkan untuk diumpankan langsung ke dalam sektor publik.

3. *Build relationships with government partners at all levels*

Membangun hubungan dengan mitra pemerintah di semua tingkatan, NGOs melakukan berbagai kegiatan dalam bidangnya selalu memakan risiko. Namun, dengan menerima dukungan dari berbagai level dalam sistem pemerintahan dapat meminimalkan risiko tersebut bagi masing-masing aktor.

4. *Progressively transfer real ownership to government partners*

Pada aspek ini, pelaksanaan kerja sama antara NGO mengalihkan kepemilikan program pada pemerintah nasional untuk memimpin implementasinya. NGO berharap kepada pemerintah nasional untuk dapat mengambil alih tanggung jawab selama proses kerja sama ini, seperti halnya dalam merencanakan dan menjalankan pelatihan, NGO memainkan peran pendukung. Langkah kecil ini telah mulai menggeser baik persepsi maupun kepemilikan aktual atas intervensi dari sebuah program NGO menjadi sistem milik pemerintah. Kepemilikan pemerintah yang efektif memastikan bahwa suatu program akan berlanjut setelah NGOs tidak lagi memegang kendali atas pelaksanaan. (Gbleou & Schechter, 2020)

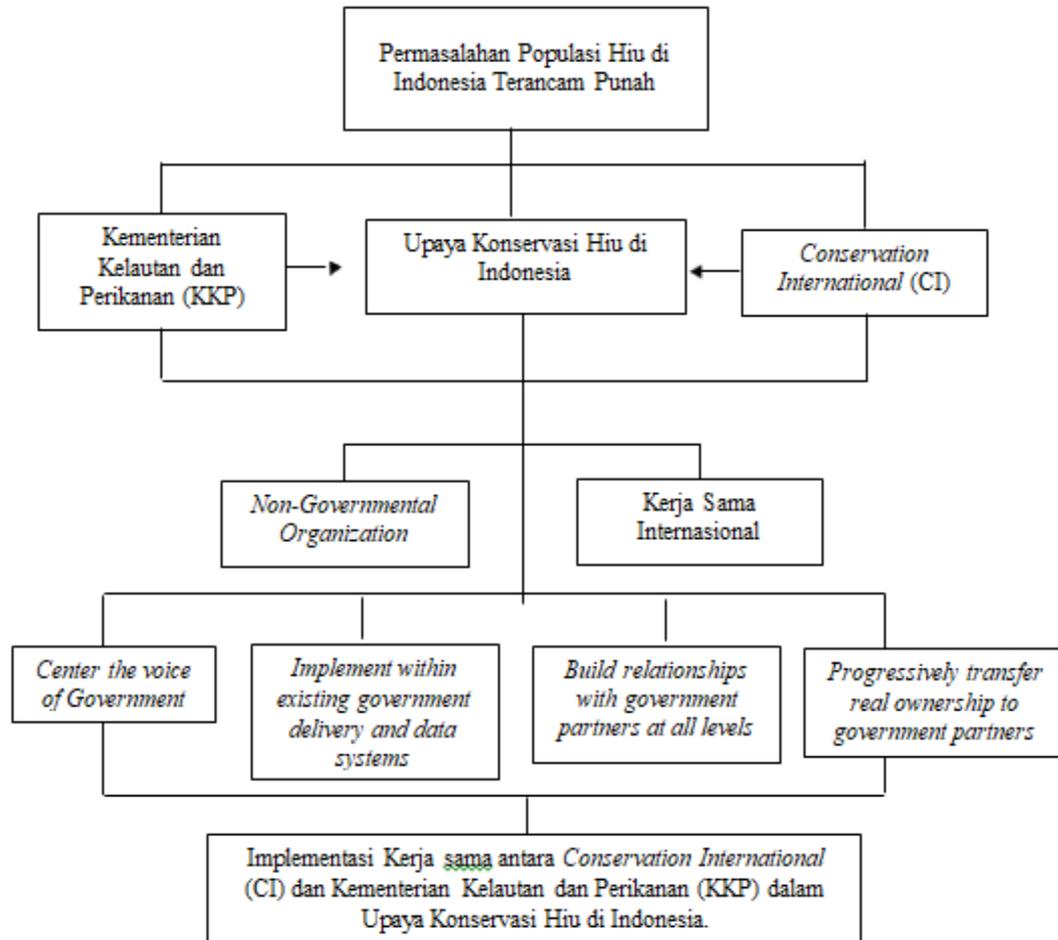
Pada penjelasan tersebut, CI masuk ke dalam kategori NGO dan KKP termasuk ke dalam *National Government*. Implementasi Kerja sama antara NGOs dan Pemerintah membutuhkan kinerja yang tulus dan saling mendukung untuk mendapatkan hasil kerja sama yang berskala dan berkelanjutan. Dimana dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui sejauh mana program-program yang akan dilakukan KKP dan CI dalam menangani permasalahan konservasi hiu di Indonesia.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan isu sentral penelitian yang akan diteliti, yaitu kerjasama yang dilakukan antara KKP dan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan di bidang kelautan dan perikanan memercayai CI yang merupakan sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) dalam pelestarian lingkungan untuk dapat melakukan kerja sama. Maka melalui perjanjian kemitraan antara kedua aktor tersebut tertuang dalam MoU yang dibuat pada tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Dengan menggunakan konsep *non-governmental organization* dan kerja sama internasional yang dilihat dari perspektif pluralisme ini diharapkan untuk membantu penulis dalam melihat bagaimana implementasi kerja sama antara KKP dan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel:

Penjelasan di atas dituangkan ke dalam bentuk skema penelitian di bawah

Tabel 3. Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Oleh Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Menurut John Creswell, penelitian diartikan sebagai metode bertahap yang diawali dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu yang diteliti. (Raco, 2010) Creswell menjelaskan, metode penelitian kualitatif menjadi suatu pendekatan dalam mendalami dan memahami suatu permasalahan. (Raco, 2010) Penelitian kualitatif dilakukan dengan model, hipotesis, perspektif teoritis dan digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, pada dasarnya tergantung pada pengamatan orang atau sekelompok orang dengan diskusi penelitian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. (K & L, 1986)

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data analitis tentang aktivitas secara umum serta memperdalam pengamatan. Penelitian ini digunakan sebagai upaya dalam memberikan alasan atas terjadinya perubahan suatu fenomena yang sedang terjadi. Digunakan bersamaan dengan teori atau konsep pada akhir penelitian setelah analisis data dilakukan dengan harapan akan muncul analisis yang lebih komprehensif. (Gray, Williamson, & et. al., 2007)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menampilkan studi kasus pada penggunaan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penjelasan dan pemahaman atas kerja sama antara KKP dan CI dalam menangani permasalahannya.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi dari kerja sama KKP dan CI untuk menyelesaikan isu lingkungan terkait konservasi hiu di Indonesia yang telah menjadi permasalahan internasional. Penelitian ini menggunakan konsep *non-governmental organization* dan melihat bagaimana NGOs dapat bekerja secara efektif dengan pemerintah menurut Seso Gbleou dan Jennifer Schechter yang akan merepresentasikan bagaimana sebuah Organisasi Non-Pemerintah Internasional menjalankan kerja samanya dengan *National Government*. Pada akhirnya, penelitian ini berfokus pada implementasi dari kerja sama internasional antara KKP dan CI dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang menjadi permasalahan internasional terkait konservasi hiu di Indonesia menurut Seso dan Jennifer yang mana NGOs dapat bekerja secara efektif dengan pemerintah untuk membangun “*real partnership*” adalah sebagai berikut: (Gray, Williamson, & et. al., 2007)

1) *Center the voice of Government*

Literatur mengenai skala melalui sektor “adopsi” publik cenderung tidak proporsional dan berfokus pada NGOs, sedangkan pemerintah berada dalam posisi sebagai penerima pasif inovasi. Namun, keberhasilan lainnya menggambarkan bahwa untuk mencapai hasilnya membutuhkan kerja sama dua arah yang tulus. Membangun kerja sama yang tulus perlu untuk “*putting government at the center*” sejak tahap awal merancang program atau prosesnya.

2) *Impelement within existing government delivery and data systems*

Pada aspek ini menjelaskan bahwa jika dengan melihat dapat mempercayai, maka dengan melihat program bekerja dalam sistem yang ada merupakan suatu prasyarat untuk berprogres dengan pemerintah. NGO bekerja dengan pemerintah nasional dengan menintegrasikan data dampak program ke dalam sistem pengumpulan data pemerintah. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dan dikumpulkan untuk diumpankan langsung ke dalam sektor publik.

Build relationships with government partnerts at all levels

Membangun hubungan dengan mitra pemerintah di semua tingkatan, NGOs melakukan berbagai kegiatan dalam bidangnya selalu memakan risiko.

Namun, dengan menerima dukungan dari berbagai level dalam sistem pemerintahan dapat meminimalkan risiko tersebut bagi masing-masing aktor.

3) *Progressively transfer real ownership to government partners*

Secara progresif harus mengalihkan kepemilikan yang sebenarnya kepada mitra pemerintah. Hal ini merupakan hal yang menjadi tujuan awal. Proses pengalihan kepemilikan dari NGOs ke pemerintah tentunya membutuhkan transisi. Mengingat risiko yang terkait dengan berbagai ide baru dan inovasinya, dapat dipahami bahwa pejabat pemerintahan juga ingin diyakinkan mengenai kelayakan dan efektivitas program sebelum mereka mengambil kendali. Kepemilikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang. Kepemilikan pemerintah yang efektif memastikan bahwa suatu program akan berlanjut setelah NGOs tidak lagi memegang kendali atas pelaksanaan. (Gray, Williamson, & et. al., 2007)

Pada penjelasan tersebut, CI masuk ke dalam kategori NGO dan KKP termasuk ke dalam *National Government*. Implementasi Kerja sama antara NGOs dan Pemerintah membutuhkan kinerja yang tulus dan saling mendukung untuk mendapatkan hasil kerja sama yang berskala dan berkelanjutan. Dimana dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui sejauh mana program-program yang dilakukan KKP dan CI dalam menangani permasalahan konservasi hiu di Indonesia.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penulis mengumpulkan sumber data sekunder yang diperoleh dari pihak kedua. Data diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan laporan resmi dari organisasi terkait seperti CIIndonesia dan KKP. Peneliti mendapatkan informasi berupa data terkait kerjasama KKP dengan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia. Peneliti mengumpulkan data ini melalui sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, website, dan sumber lain yang berhubungan dengan subjek penelitian. KKP mengeluarkan laporan-laporan resmi terkait kinerjanya selama periode tertentu dan penanganan kasus tertentu yang sebagian berisikan tentang status penanganan hiu di Indonesia yang dapat dijadikan literatur dalam penelitian ini. Untuk memperkaya penelitian, penulis

mengumpulkan berbagai informasi dan data melalui *website conservation international* Indonesia secara resmi pada <https://www.conservation.org/indonesia>, dan website Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia pada <https://kkp.go.id/>, Portal Media yang berkaitan dengan topik, MoU dan Peraturan daerah yang terlibat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka dengan pemangku kepentingan dan para ahli di bidang yang relevan dengan penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah CI Indonesia sebagai LSM yang berperan dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya di Indonesia dan KKP sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Teknik pengumpulan data ini dibangun berdasarkan pemahaman tentang latar belakang dan teori penelitian sebelumnya. Penelitian sastra adalah teknik pengumpulan data dalam mencari literatur dari buku-buku tentang topik dengan kasus yang jelas atau berdasarkan kronologis peristiwa. (Babbie, 2014)

3.5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam melakukan penelitian, maka dari itu, analisis yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman, yaitu:

- *Data condensation*, yaitu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pengabstraksian data yang terkumpul menjadi data yang kompleks yang digunakan untuk mendefinisikan masalah, menghasilkan ide-ide baru, dan menyusun hipotesis.
- *Data Display* atau penyajian data untuk membantu peneliti melihat gambaran masalah secara keseluruhan atau sebagian dari data penelitian.
- *Conclusion Drawing/Verification* penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari analisis data. Pada tahap verifikasi, data yang diperoleh melalui studi pustaka disajikan sehingga dapat ditarik

kesimpulan dan dapat dijawab untuk rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil dan membahas studi yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran untuk memberi pemahaman lebih baik dan wawasan terkait topik skripsi ini, terlebih lagi, penulis akan menyampaikan saran dalam implementasi kerja sama antara NGO dan Pemerintah Nasional khususnya *Conservation International* (CI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kedepannya.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah memaparkan kerja sama CI dan KKP terkait konservasi hiu di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif dan analisis studi pustaka dengan penggunaan data sekunder yang didapatkan dari buku teori hubungan internasional, penelitian terdahulu serta data yang disajikan oleh CI dan KKP terkait kerja sama bidang kelautan dan perikanan. Penelitian ini menggunakan teori kerja sama Internasional, NGO, dan kerja sama NGO dengan pemerintah nasional

Kerja sama CI dan KKP telah ditemukan hasil dengan menggunakan empat aspek kerja sama NGO dengan pemerintah nasional, yaitu pertama, *center the voice of government* yang dapat dilihat melalui kerja sama Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hiu dan Pari untuk melestarikan sumber daya hiu dan pari di perairan Indonesia, kerja sama tersebut menghasilkan bahwa pengelolaan hiu melibatkan beberapa sektor, baik di tingkat nasional maupun lokal dengan terbentuknya *National Plan of Action* (NPOA). Tanggung jawab pelaksanaan

kerja sama ini diemban oleh lintas lembaga, yaitu CI dan KKP dan lintas sektor seperti tingkat nasional maupun daerah.

Kedua, *Implement within existing government delivery and data systems* yang menunjukkan bahwa NGO bekerja dengan pemerintah nasional dengan mengintegrasikan data dampak program ke dalam sistem pengumpulan data pemerintah. Data yang telah terkumpul ini dianalisis dan dikumpulkan untuk disediakan ke dalam sektor publik. Pada kerja sama CI dan KKP yang tertera dalam perjanjian MoU antara CI dan KKP tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional pada tahun 2017 menghasilkan data-data yang kemudian dikumpulkan menjadi sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh KKP ke sektor publik melalui laman resminya. Hasil laporan kinerja MoU tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019.

Ketiga, *Build relationships with government partners at all levels* menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh CI dan KKP merupakan kerja sama konservasi hiu yang memerlukan berbagai intervensi, dengan fokus nilai guna dan non guna, dan pada tingkat rantai perdagangan dari titik eksploitasi ke titik konsumsi. Dengan diperlukannya pendekatan multi-segi, prioritas strategi di sini dimaksudkan untuk menguraikan serangkaian intervensi yang komprehensif pada tingkat yang berbeda. Hal ini dirancang untuk memenuhi visi, tujuan, dan prioritas untuk pelestarian hiu yang diartikulasikan dalam Prioritas Global Sharks and Rays Initiative (GSRI). GSRI ini merupakan kemitraan antara beberapa organisasi konservasi internasional – *Shark Advocates International, Shark Trust, TRAFFIC, Wildlife Conservation Society (WCS), dan World Wide Fund for Nature (WWF)*, dengan saran teknis dari Kelompok Spesialis Hiu IUCN.

Keempat, *Progressively transfer real ownership to government partners* menunjukkan bahwa ide yang dimiliki oleh suatu NGO yang dikatakan sebagai sebuah program ditransfer atau dialihkan sebagai suatu program pemerintah. CI memiliki program inisiasi strategis, yaitu program konservasi hiu dan pari. Program yang dimiliki oleh CI tersebut berhasil dialihkan ke dalam program pemerintah bersama KKP untuk dilaksanakan kegiatan secara langsung. CI dan

KKP berhasil memasang penanda satelit yang mana kegiatan tersebut menjadi salah satu kegiatan dari program CI yang berhasil dilaksanakan bersama KKP pada tahun 2018 dan mengalami progres signifikan. Dengan demikian, program inisiasi strategis hiu dan pari yang dimiliki oleh CI, berhasil dikembangkan oleh KKP melalui prosiding simposium hiu dan pari di Indonesia.

Kerja sama yang dilakukan oleh CI dan KKP dalam konservasi hiu di Indonesia telah diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan dan dianalisis melalui keempat aspek di atas, aspek-aspek tersebut berhasil dianalisis melalui beberapa kegiatan kerja sama CI dan KKP seperti pengelolaan kawasan konservasi, sosialisasi kesadaran masyarakat, dan pemasangan penanda satelit pada individu hiu guna memantau pergerakan hiu. Pada penelitian kerja sama CI dan KKP dalam konservasi hiu di Indonesia menunjukkan hasil yang sesuai dengan keempat aspek yang dikemukakan oleh Sesso Gbleou dan Jennifer Schechter terkait kerja sama NGO dengan pemerintah nasional. Penulis berhasil menemukan data-data kegiatan kerja sama yang sesuai dengan aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, kerja sama antara CI dan KKP berhasil dikatakan sebagai kerja sama yang berskala atau ideal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kerja Sama KKP dan CI dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Kerja sama antara CI dan KKP sebaiknya lebih memerhatikan pada pembagian kewenangan tugas kerja sehingga kerja sama ini dapat terlihat dengan jelas tugas dan fungsi dari masing-masing pihak dalam melakukan konservasi hiu di Indonesia.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi yang lebih luas terkait kerja sama pada kedua aktor dalam penelitian ini pada upaya konservasi hiu di Indonesia. Penulis berharap untuk penelitian berikutnya dapat mendalami motif apa yang dilakukan oleh kedua aktor pada mitra kerja sama ini sehingga dapat mengetahui lebih spesifik hasil dari kerja sama yang didapatkan selama proses kerja sama ini berlangsung melalui sudut pandang teori dan konsep yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Babbie, E. (2014). *The Basics of Social Research*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok: PT Desindo Putra Mandiri.
- Gray, P., Williamson, J., & et. al. (2007). *The Research Imagination: An Introduction to Qualitative Methods*. New York: Cambridge University Press.
- K, J., & L, M. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publicants, Inc.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sitepu, P. A. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

- Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. Vol. XV, No. 1. Hal.19.
- International, C. (2020). *Impact Report* . Conservation International.
- International, C. (2020). *We Are a Movement*. Conservation International.
- Lewis, D., K, N., & S, N. (2020). *Non-Governmental Organizations and Development. 2nd Ed*. New York: Routledge.
- Perwita, A., & Yadi, Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, A., Dwi, S., & Widiastuti, E. (2017). Struktur Komunitas Foraminifera Bentuk dan Hubungannya dengan Kemelimpahan Plankton Terhadap Terumbu Karang Gosong Susutan dan Pasir Timbul, Teluk Lampung. Vol. 4, No.1. Hal.48.

Saeri, M. (2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Internasional*, Vol. 3, No. 2. Hal. 15.

Saraswati, W. K. (2016). Respon Pemerintah Indonesia Terkait Sekuritisasi WWF Melalui Kampanye Save Our Sharks. *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 4. , 71.

WEBSITE

Admin. (2021, January 19). *Taman Nasional Teluk Cenderawasih*. Retrieved January 29, 2022, from Conservation International Jalin Kerja Sama dengan BBTNTC: <https://telukcenderawasihnationalpark.com/conservation-international-jalin-kerja-sama-dengan-bbtntc/>

Alaydrus, I. (2019, October 31). *Villagerspot.com*. Retrieved February 08, 2022, from CI Indonesia Gandeng Mowilex Konservasi Hiu Paus di Sumbawa: <https://villagerspost.com/todays-feature/ci-indonesia-gandeng-mowilex-konservasi-hiu-paus-di-sumbawa/>

CI-Indonesia. (2021). *Conservation Indonesia About Us*. CI.org.

CNN. (2021). *CNN Indonesia*. Retrieved March 22, 2021, from Populasi Hiu dan Pari Turun Drastis: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204094350-199-602111/populasi-hiu-dan-pari-turun-drastis>

Dermawan, A. (2017). *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved January 13, 2021, from Pengelolaan Ruang Laut: <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/HUMAS/Pengelolaan%20Ruang%20Laut.pdf>

Direktorat. (2018, April 18). *Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Laut*. Retrieved September 27, 2021, from KKP Tetapkan Hiu Paus (Rhincodon typus) Sebagai Ikan yang Dilindungi: <https://kkp.go.id/djprl/kkhl/artikel/3303-kkp-tetapkan-hiu-paus-rhincodon-typus-sebagai-ikan-yang-dilindungi>

Ditjen, K. (2019). *Ditjen Pengelolaan Ruang dan Laut*. Retrieved Januari 14, 2021, from Loka Pengelolaan SD Pesisir & Laut Sorong: <https://kkp.go.id/djprl/lpsplSORONG/artikel/12643-pesona-ikan-hiu>

Foundation, C. I. (2017, April 05). *Conservation International*. Retrieved March 29, 2020, from Perjanjian Kemitraan antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian dan Perikanan: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/bkkpn%20kupang/Regulasi/V.2.a.%20Perjanjian%20Kemitraan%20CI.pdf>

Gbleou, & Schechter. (2020). *Standford Social Innovation Review*. Retrieved Agustus 4, 2021, from How NGOs Can Work With Governments to Build Partnerships That Will Scale: melalui https://ssir.org/articles/entry/how_ngos_can_work_with_governments_to_build_partnerships_that_will_scale#

International, C. (2019). *Conservation International.org*. Retrieved Maret 29, 2020, from About: <https://www.conservation.org/about>

International, C. (2020). *Conservation International.org*. Retrieved Januari 13, 2021, from Conservation International.org Indonesia : <https://www.conservation.org/indonesia/tentang-kami>

International, C. (2020, January 18). *Conservation International.org*. Retrieved March 29, 2020, from president-of-the-democratic republic of timor leste enters partnership with conservation international: <https://www.conservation.org/press-releases/2020/01/18/president-of-the-democratic-republic-of-timor-leste-enters-partnership-with-conservation-international>

International, C. (2021). *Program Konservasi Hiu dan Pari*. Retrieved Januari 14, 2021, from Conservation International. : <https://www.conservation.org/indonesia/kerja/hiu-dan-pari>

International., C. (2019, December 13). *Conservation International.org*. Retrieved March 29, 2020, from Conservation International Statement on the European Green Deal: <https://www.conservation.org/press-releases/2019/12/13/conservation-international-statement-on-the-european-green-dea>

KKP. (2019). *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved September 17, 2021, from Biro Kerja Sama dan Humas. E-KerjaSama: <https://kkp.go.id/page/7-visi-dan-misi>.

KKP. (2020). *Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut*. Retrieved Januari 14, 2021, from Perlindungan Hiu di Indonesia: <https://kkp.go.id/djprl/kkhl/infografis-detail/2212-infografis-perlindungan-hiu-di-indonesia>

KKP. (2021). *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved January 13, 2021, from Indonesia-Malaysia Perkuat Kerja Sama Sektor Perikanan:

<https://kkp.go.id/artikel/11891-indonesia-malaysia-perkuat-kerja-sama-sektor-perikanan>

- KKP. (2021). *Kementerian Kelautan dan Perikanan: Tugas dan Fungsi*. Retrieved January 13, 2021, from <https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi>.
- Kp3K, D. (2011). *Penguatan Pengelolaan KKP Ditjen Kp3K*. Retrieved Januari 14, 2021, from Arahana dan Kebutuhan Penelitian Konservasi Jenis Ikan: <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/dokumen/finish/102-presentasi/922-arahan-dan-kebutuhan-penelitian-konservasi-jenis-ikan-12-1-11>
- RAN. (2020). *Rencana Aksi Nasional* . Retrieved January 14, 2021, from Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/KKHL/BUKU/RAN%20Konservasi%20hiu%20pari.pdf>
- UU. (2017). *Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat No. 8 Tahun 2017, Pasal 11 dan Pasal 4 dalam Azas, Tujuan dan Ruang Lingkup*. Raja Ampat.